

**KEKUATAN MODAL SOSIAL DALAM KONTESTASI  
POLITIK PEMILIHAN KEPALA DESA  
(Studi Kasus Keterpilihan Kepala Desa Kindang)**

***THE SOCIAL CAPITAL STRENGTH IN POLITICAL  
CONTESTATION IN VILLAGE HEAD ELECTION  
(A Case Study on Electability of Kindang Village Head)***

**J U P R I  
E032171007**



**PROGRAM PASCASARJANA SOSIOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

Tesis  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi  
Sosiologi

Disusun dan diajukan oleh

JUPRI

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**KEKUATAN MODAL SOSIAL DALAM KONTESTASI POLITIK  
PEMILIHAN KEPALA DESA  
(Studi Kasus Keterpilihan Kepala Desa Kindang)**

Disusun dan diajukan oleh

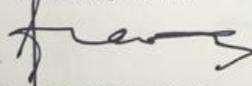
**JUPRI**

**E032171007**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada tanggal **16 Juli 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

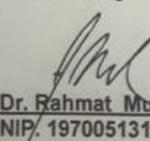
Pembimbing Utama,

  
**Prof. Dr.H.M. Tahir Kasnawi, SU**  
NIP. 194809131978031001

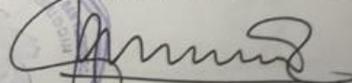
Pembimbing Pendamping,

  
**Dr. Suparman Abdullah., M.Si**  
NIP. 196807151994031004

Ketua Program Studi  
Ilmu Sosiologi,

  
**Dr. Rahmat Muhammad, M.Si.**  
NIP. 197005131997021002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,

  
**Prof. Dr. H. Armin, M.Si.**  
NIP. 196511091991031008



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JUPRI  
Nomor Pokok : E032171007  
Program Studi : Sosiologi

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya yang berjudul: **Kekuatan Modal Sosial Dalam Kontestasi Politik Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Keterpilihan Kepala Desa Kindang)**

Karya ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 2021

Yang menyatakan,



JUPRI

## **PRAKATA**

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan selesainya tesis ini. Penulisan tesis yang berjudul “ **KEKUATAN MODAL SOSIAL DALAM KONTESTASI POLITIK PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Kasus Keterpilihan Kepala Desa Kindang)** ”

ditujukan untuk memenuhi syarat penyelesaian jenjang pendidikan Strata Dua (S2) di Program Pasca Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar. Persoalan kekuatan modal sosial dalam kontestasi pemilihan kepala desa menjadi instrument dalam memperebutkan suatu legitimasi publik dalam meraih kemenangan. Penulis persembahkan tesis ini kepada kedua orang tua penulis, Sina, sosok Ibu yang tiada lelah berjuang untuk kebaikan masa depan keluarganya, dan Salampe, sosok Bapak yang terus bekerja keras untuk mewujudkan harapan keluarga. Pada mereka, segala yang penulis peroleh adalah berkat yang tidak mampu penulis balaskan. Penulis bersyukur memiliki mereka. Untuk adik-adik penulis, Riswam, Gita Amaliah, dukungan dan doanya adalah keberkahan yang memberi kekuatan untuk saya terus belajar.

Proses penyusunan tesis ini, banyak mendapatkan dukungan, arahan, bantuan, petunjuk, dan doa dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa tanpa semua itu, tesis ini tidak akan terselesaikan sebagaimana mestinya. Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU., selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Suparman Abdullah, M.Si., selaku pembimbing II, atas segala arahan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis;
2. Bapak Dr. Rahmat Muhammad, M.Si, Dr. Mansur Radjab, M,Si, dan Dr. Sakaria, S.Sos, M.Si selaku tim penguji yang telah memberikan saran, kritik, masukan untuk penyempurnaan tesis ini;

3. Para pimpinan, dosen, pegawai dan staff Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan kepada penulis;
4. Kawan-kawan S2 Sosiologi 2017, kalian lebih dari sekadar teman,, tapi keluarga baru yang unik. Kebersamaan yang kita jalani adalah salah satu kesan yang akan selalu dirindukan. Diskusi terbuka namun terarah seakan tak mampu untuk dipadamkan, dan semoga tidak akan pernah padam di ruang yang berbeda.
5. Kepada seluruh informan yang telah memberikan informasi dalam proses peneltian ini.
6. Seluruh keluarga penulis yang tercinta, atas semangat dan doa demi keberhasilan proses ini;

Akhirnya penulis menyadari akan keterbatasan dan kekurangan tesis ini. Akan tetapi, penulis berharap agar tulisan ini dapat mewarnai khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi masukan untuk penyelesaian atas masalah yang dituliskan dalam tesis ini. Semoga karya ini bermanfaat

Makassar, 2021



**JUPRI**

## ABSTRAK

**JUPRI.** *Kekuatan Modal Sosial dalam Kontestasi Politik Pemilihan Kepala Desa: Studi Kasus Keterpilihan Kepala Desa Kindang (dibimbing oleh Tahir Kasnawi dan Suparman Abdullah).*

Penelitian ini bertujuan melihat gaya kepemimpinan dan kekuatan modal sosial yang dimiliki Nurdin dalam kontestasi politik tahun 2016.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggali kekuatan modal sosial dalam transformasi kepemimpinan kepala desa. Adapun, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan sebelumnya dibatasi pada gaya kepemimpinan periode 2002 - 2016. Pada periode 2002-2004 ketika karaeng Oddang berkuasa, dalam kepemimpinannya berusaha lebih demokratis. Namun, dominasi ayahnya (Karaeng Manna) masih kuat saat itu. Begitu pula dengan gaya kepemimpinan Karaeng Awaluddin. Beliau merupakan tipikal pemimpin yang dinilai masyarakat sangat baik dan menyadari nilai-nilai demokrasi selama menjabat sebagai Kepala Desa Kindang periode 2004 - 2009. Pada tahun 2009 - 2016 transformasi kepemimpinan terjadi. Potret gaya kepemimpinan Nurdin periode 2009 tidak lepas dari apresiasi dan kritikan. Namun, kritik tersebut tidak berdampak pada pemilihan kepala desa tahun 2016. Nurdin kembali memenangkan kontestasi dengan kekuatan modal sosial dalam kontestasi politik. Tiap-tiap calon memiliki kekuatan modal sosial *bonding*, *bridging* dan *linking*. Namun, tetap membuat Nurdin menang dalam pemilu. Munculnya sentimen primordial di kalangan masyarakat awam (*tumaradeka*) sebagai kekuatan Nurdin, di sisi lain munculnya stereotipe negatif terhadap karaeng yang menjalar pada persoalan identitas kelompok dan kuatnya modal jejaring sosial, *bonding*, *bridging* dan *linking* yang sangat kuat mewarnai pilakdes 2016. Pengendalian jaminan keamanan menjadi nilai jual bagi Nurdin sehingga mendapat dukungan dari masyarakat dibandingkan dengan calon lain yang dianggap tidak layak dan tidak mampu mengantisipasi keamanan di Desa Kindang.

Kata kunci: kekuatan modal social, kontestasi politik, pemilihan kepala desa



## ABSTRACT

**JUPRI.** *The Social Capital Strength in Political Contestation in Village Head Election (A Case Study on Electability of Kindang Village Head)* (supervised by Tahir Kasnawi and Suparman Abdullah).

The research aims at examining the leadership style and social capital strength possessed by Nurdin in the political contestation in 2016.

The research used the qualitative descriptive method to explore the social capital strength in the transformation of the village head leadership. The research used the phenomenological approach.

The research result indicates that the previous leadership style was limited on the leadership style in the period of 2002 – 2016. In the period of 2002 – 2004, when *karaeng* Oddang was in power, in his leadership he tried to be more democratic, however, his father's (*karaeng* Manna) domination was still strong at that time. Similarly, the leadership style of *karaeng* Awaluddin, he was the typical leader who was considered very good leader by the community and was aware of the democratic values during his tenure as the Head of Kindang Village in the period of 2004- 2009. In 2009 – 2016. This was the time when the leadership transformation occurred. Photographing Nurdin's leadership style in the period of 2009 could not be separated from the appreciation and criticism. However, the criticism did not have any impact on the village head election in 2016. Nurdin again won the contestation. The social capital strength in the political contestation, every candidate has the social capital strength such as the bonding, bridging, and linking. However, Nurdin won again the election. The emergence of the primordial sentiment among the ordinary community members (*tumaradeka* = free people) as Nurdin's strength. On the other hand, the emergence of the negative stereotype against *karaeng* spreading to the group identity issue and social network capital strength, very strong *bonding*, *bridging*, and *linking* colours the village head election in 2016. The security assurance control becomes Nurdin's selling point, so that he gets more community support than the other candidates who are considered infeasible and unable to anticipate the security at Kindang Village.

Key words: Social capital strength; political contestation of village head election.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iii
PRAKATA.....	iv
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Kekuatan Modal Sosial dalam Kontestasi Politik Pemilihan Kepala Desa .....	14
1. Konsep Modal Sosial .....	14
2. Unsur-Unsur Modal Sosial.....	15
1. Nilai.....	15
2. Trust.....	17
3. Jaringan .....	22
B. Kekuatan Modal Sosial Bonding, Bridging dan Linking dalam kontestasi Politik Pemilihan Kepala Desa .....	25
1. Kekuatan Modal Sosial Bonding dalam Kontestasi Politik Pemilihan Kepala Desa .....	25
2. Kekuatan Modal Sosial Bridging dalam Kontestasi Politik Pemilihan Kepala Desa .....	28

3. Kekuatan Modal Sosial Linking dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Desa .....	29
C. Kekuatan Modal Sosial dalam Kontestasi Politik Pemilihan Kepala Desa.....	30
1. Kekuatan Modal Manusia dalam Kontestasi Politik Pemilihan Kepala Desa .....	30
2. Relasi Gaya Kepemimpinan dan Modal Sosial dalam Tranformasi Kepemimpinan Kepala Desa .....	32
3. Penelitian Terdahulu .....	42
D. Kerangka Pikir .....	51

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Rancangan Penelitian .....	57
B. Pengelolaan Peran Penelitian .....	58
C. Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	58
D. Karakteristik Informan .....	59
E. Sumber Data.....	64
F. Metode Pengumpulan Data.....	64
G. Analisis Data.....	70
H. Pengecekan Validitas Temuan/ Kesimpulan .....	71
I. Matriks Metode Penelitian .....	72

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	73
1. Keadaan Geografis Desa Kindang .....	73
2. Sejarah Pemerintahan Desa Kindang .....	78
B. Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Periode 2002-2016 .....	83
1. Gaya Kepemimpinan Periode 2002-2004.....	83
2. Gaya Kepemimpinan Periode 2004-2009.....	91
3. Gaya Kepemimpinan Periode 2009-2016 .....	95
C. Kekuatan Modal Sosial dalam Kontestasi Politik Pemilihan Kepala Desa.....	103

1. Kekuatan Modal Manusia.....	103
1. Kontrol Sosial Keamanan.....	103
2. Modal Ketokohan .....	118
2. Kekuatan Modal Sosial Trust dan Distrust dalam Kontestasi Politik Pemilihan Kepala Desa .....	119
1. Trust .....	119
2. Distrust .....	123
3. Kekuatan Modal Sosial Jaringan dalam Kontestasi Politik Pemilihan Kepala Desa .....	127
D. Kekuatan Modal Sosial Bonding, Bridging, dan Linking dalam Kontestasi Politik Pemilihan Kepala Desa .....	130
1. Kekuatan Modal Sosial Bonding dalam Kontestasi Politik Pemilihan Kepala Desa .....	135
1. Primordialisme .....	141
2. Streetife .....	144
2. Kekuatan Modal Sosial Bridging dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Desa.....	152
1. Lembaga Formal dan Kelompok Sosial Sebagai Kekuatan Modal Sosial dalam Kontestasi Politik Pemilihan Kepala Desa .....	153
2. Kelompok Hitam.....	161
3. Kekuatan Modal Sosial Linking dalam Kontestasi Politik Pemilihan Kepala Desa.....	163

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 171

B. Saran ..... 174

**DAFTAR PUSTAKA..... 176**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	43
Tabel. 2 Daftar Nama Informan .....	60
Tabel. 3 Matriks Metode Penelitian.....	72
Tabel. 4 Jumlah Penduduk Desa Kindang .....	75
Tabel. 5 Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kindang Tahun 2009 .....	96
Tabel. 6 Kekuatan Modal Sosial Trust dan Distrut dalam Kontestasi Politik Pemilihan Kepala Desa.....	125
Tabel. 7 Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kindang Tahun 2016 .....	130
Tabel. 8 Matrix Perbandingan Kekuatan Modal Sosial dalam Kontestasi Politik Pemilihan Kepala Desa .....	134
Tabel. 9 Lembaga Formal Sebagai Kekuatan Modal Sosial dalam Kontestasi Politik Pemilihan Kepala Desa.....	153

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Gambar. 1 Bagang Kerangka Pikir ..... 51
2. Gambar. 2 Bagang Modal Sosial Nurdin. .... 120

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Abad ke 20 disebut sebagai abad demokrasi, sebab pada penghujung abad ke 20 ini terjadi perubahan peta politik, perubahan peta politik ini disebut sebagai gelombang ketiga demokrasi, gelombang ketiga demokrasi ini bermula pada pertengahan tahun 1970 an di Portugal dan kemudian berkembang diberbagai bagian dunia, Eropa Selatan, Eropa Timur, Amerika Latin dan beberapa negara. Keruntuhan sistem politik dari tidak demokratik kepada sistem politik demokratik disebut Fukuyama sebagai berakhirnya sejarah atau *the end of history*. Gelombang demokrasi ketiga tersebut, melahirkan transisi ke demokrasi, yaitu perubahan dari dari rezim diktator kepada sistem demokrasi (Muhammad, 2008).

Indonesia sendiri punya sejarah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia diwarnai dengan berbagai jenis gaya dan corak kepemimpinan dari para pemimpin. Gaya kepemimpinan yang paling membekas di hati masyarakat Indosesia adalah gaya kepemimpinan otoriter yang terjadi pada masa periode kepemimpinan Soeharto. Gaya kepemimpinan Soeharto tersebut menyebabkan krisis ekonomi dan politik yang parah sehingga para pemuda ketika itu menuntut suatu perubahan yang disebut reformasi. B.J Habibi yang merupakan presiden lanjutan dari Soeharto tidak memiliki pilihan lain selain melakukan

reformasi yang dituntut oleh masyarakat. Sehingga era ini dianggap sebagai awal periode demokrasi dengan perpolitikan yang terbuka dan liberal. Dalam masa desentralisasi pemerintahan mulai memudar, ini dibuktikan dengan otonomi diberikan kepada daerah (Naimah, 2015).

Runtuhnya pemerintahan orde baru yang otoriter merupakan hal yang dinantikan di Indonesia, keruntuhan tersebut memberikan cahaya baru bagi masyarakat Indonesia sebagai era baru yang saat ini kita kenal dengan sistem demokrasi, sistem demokrasi telah mengubah citra kekuasaan absolut yang diperaktekan pasca orde baru, keruntuhan perubahan peta politik dari rezim otoriter ke demokrasi memberikan warna baru dalam pesta demokrasi, adanya proses transformasi sistem politik dari diktator ke demokrasi memberikan peluang bagi setiap orang turut andil dalam pesta demokrasi. (Arum, 2020)

Transformasi biasanya diartikan sebagai proses perubahan dari suatu kondisi (bentuk awal) ke kondisi akhir, transformasi tersebut sangat dipengaruhi oleh budaya, politik yang dapat mengubah struktur masyarakat baik dari aspek eksternal dan internal. Sehingga kita bisa katakan bahwa transformasi merujuk pada suatu perbedaan ciri dalam waktu tertentu. Proses ini mengandung tiga unsur penting. Pertama, perbedaan merupakan aspek yang sangat penting dalam proses transformasi karena dengan perbedaanlah dapat dilihat perwujudan dari sebuah proses transformasi. Kedua, konsep ciri atau identitas yang merupakan acuan di dalam proses transformasi, baik ciri sosial,

ekonomi, penampilan atau status seseorang dalam masyarakat. Ketiga, proses transformasi selalu bersifat historis yang terikat pada satuan waktu yang berbeda (Puji, 2011).

Transformasi kepemimpinan yang dimaksud di sini adalah suatu perubahan atau perpindahan pemegang kekuasaan dari masyarakat bangsawan (*karaeng*)<sup>1</sup> ke masyarakat *tumaradeka*.<sup>2</sup> Transformasi kepemimpinan masih menjadi topik yang menarik untuk didiskusikan, baik itu dari transformasi kepemimpinan yang berskala besar seperti presiden sampai transformasi kepemimpinan desa yang berskala kecil. Walaupun peralihan kepemimpinan desa berskala kecil. Namun, pemilihan kepala desa ini juga tergolong pesta demokrasi yang selalu dinantikan oleh masyarakat.

Transformasi kepemimpinan dalam satu desa bukanlah hal yang baru karena peralihan ini telah diatur oleh Undang-Undang tahun 2014 tentang peraturan desa bahwa pemilihan kepala desa dilakukan satu kali dalam lima tahun. Walaupun pada dasarnya kepala desa yang masih dalam masa jabatan masih bisa mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa pada periode berikutnya, karena konstitusi yang mengatur tentang pemilihan kepala desa memberikan peluang kepada warga untuk

---

<sup>1</sup> Di Kabupaten Bulukumba, khusus di Desa Kindang ada istilah tertentu untuk masyarakat golongan bangsawan yaitu biasa disebut Andi/karaeng. Andi/ Karaeng suatu bentuk stratifikasi sosial dalam masyarakat yang membedakan dengan masyarakat lainnya.

<sup>2</sup> Istilah Tu Maradeka (Makassar) bermakna seseorang yang memiliki status sosial yang membedakan antara Karaeng dan Tu Maradeka. Maradeka adalah orang biasa sedangkan Ana karaeng merupakan dari keturunan Raja.

menjabat selama 3 periode. Transformasi kepemimpinan biasanya dipengaruhi oleh berbagai macam, baik faktor politik, atau perbedaan kepentingan dalam suatu masyarakat.

Secara universal, undang-undang nomor 14 tahun 2014 telah mengatur masalah pemilihan kepala desa bahkan kriteria-kriteria yang wajib dimiliki oleh calon kepala desa pun telah ditetapkan. Setidaknya ada 13 kriteria yang wajib dipenuhi oleh setiap calon kepala desa yaitu 1) warga negara Republik Indonesia; 2) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika; 4) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; 5) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; 6) bersedia dicalonkan menjadi kepala desa; 7) terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; 8) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 9) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan

sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; 10) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 11) berbadan sehat; 12) tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan 13) syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah (Bratakusumah, Deddy, 2001)

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, ini berarti bahwa terpilihnya seseorang sebagai kepala desa juga tidak terlepas dari peran masyarakat di desa tersebut. Dengan berlakunya sistem demokrasi pada pemilihan kepala desa memberikan peluang besar bagi kepala desa sebelumnya untuk terpilih kembali sebagai kepala desa pada periode selanjutnya. Tentunya dengan kinerja-kinerja positif selama menjabat selama lima tahun yang memberikan manfaat, akan menjadi senjata yang sangat penting bagi kepala desa tersebut. Namun sebaliknya, jika kepemimpinan yang dijalankan oleh kepala desa tersebut justru memberikan dampak negatif, kemungkinan besar antusias masyarakat dalam memilih kembali orang tersebut akan rendah. Apalagi ketika masyarakat sangat merasakan dampak negatif dari bias kepemimpinannya.

Tranformasi kepemimpinan bisanya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik faktor politik, diskriminatif dan perlakuan tidak adil dan kekerasan merupakan hal yang primer yang menimbulkan kesadaran kolektif di suatu daerah. Pemilihan kepala desa (Pilkades)

merupakan pesta demokrasi unit terkecil sekaligus menyediakan ruang kepada calon untuk mendapatkan kepercayaan kepada masyarakat, calon kepala desa sebagai representasi dari masyarakat membutuhkan suatu dukungan dari masyarakat dalam masyarakat desa, arena kontestasi pilkades di Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. Seorang calon tentunya harus memiliki modal sebagai instrumen dalam mengikuti kompetisi pilkades. Dalam pemilihan kepala desa, kekuatan modal sosial sangat diperlukan dalam mengikuti kontestasi politik. Seyogyanya harus memiliki beberapa modal sosial, tidak hanya mengandalkan popularitas, akan tetapi membutuhkan modal lain seperti modal ekonomi, modal personal seorang atau lebih dikenal sebagai *human capital* calon, modal kepercayaan (*trust*). Meskipun diketahui bersama bahwa sejak terjadinya revolusi industri berdampak pada relasi sosial yang menyebabkan masyarakat tercabut dari akar kolektifitasnya menjadi individualis, atau dalam istilah Durkheim dari masyarakat yang bercirikan solidaritas mekanik ke solidaritas organik. Salah satu dampak dari transisi tersebut tidak hanya mencabut masyarakat dari akar kolektivitasnya akan tetapi juga menimbulkan berbagai macam patologi sosial seperti hilangnya solidaritas mekanik, gotong royong, individualistik sebagai ciri dari pergeseran tersebut. (Pip, 2010) sehingga kepercayaan (*trust*) terkikisnya *trust* dari masyarakat saling curiga mencurigai antara satu dengan yang lainnya sesuatu tidak bisa dinafikan, sehingga semangat kolektifitas semakin teramat sulit

menyatukan masyarakat. Fakta tersebut menjadi cerminan bahwa modal sosial dalam konteks pesatuan, baik menyatukan gagasan-gagasan dan pendapat adalah hal sangat mustahil kita raih, pernyataan tersebut mungkin terdengar pesimis, akan tetapi itulah fakta yang harus diakui.

Tercabutnya masyarakat dari kolektifitas merupakan tantangan baru, relasi sosial menjadi semakin longgar, kelonggaran tersebut menjadi tantangan bagi calon kepala desa untuk mendapatkan suatu dukungan dari masyarakat, meskipun masyarakat dalam tingkat desa ikatan-ikatan kekeluargaan masih menjadi ciri yang umum yang sering kita temui dalam masyarakat desa yang relatif homogen. Homogenitas suatu masyarakat tentu memiliki ikatan-ikatan kekeluargaan sehingga radius kepercayaan diantara mereka relatif kuat, ikatan-ikatan kekeluargaan mungkin berbeda dengan yang lainnya seperti dicatat oleh Fukuyama bahwa masyarakat di Cina dan Amerika Latin ikatan kekeluargaan sangat kuat, akan tetapi sangat sulit mempercayai orang asing, tingkat kerja sama dengan orang luar sangat rendah.(Francis, 2010). contoh di atas semakin menguatkan bahwa *trust* elemen sangat penting yang harus dimiliki oleh calon yang terlibat dalam kompetisi Fukuyama (2016).

Selain itu dalam kontestasi politik, seorang calon kepala desa yang akan mengikuti kontestasi dalam pilkades, modal budaya, modal jaringan, modal popularitas, modal politik, modal ekonomi, dan modal kepercayaan (*trust*) beberapa modal sosial yang telah penulis sampaikan

di atas dapat mempengaruhi seorang kandidat dalam memperoleh dukungan dari masyarakat. Semakin besar kekuatan modal sosial yang dimiliki oleh seorang kandidat maka semakin besar pula dukungan yang diperoleh (Stella Maria, 2012).

Salah satu desa di Sulawesi Selatan yang juga menganut sistem demokrasi dalam pemilihan kepala desa adalah desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. Menariknya, di desa ini masyarakat masih mengenal sistem stratifikasi yang membuat mereka tergolong dalam golongan masyarakat yang berbeda, yaitu golongan bangsawan (*karaeng*) dan golongan *maradeka*. Penggolongan masyarakat ini ke dalam stratifikasi menimbulkan *gap* di antara mereka. Masyarakat bangsawan (*karaeng*) adalah masyarakat yang memiliki status yang terhormat di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat *maradeka* merasa segan kepada mereka. Status *karaeng* dalam lapisan masyarakat merupakan sebuah status yang didapatkan dari keturunan keluarga. Sedangkan masyarakat *maradeka* adalah kumpulan masyarakat yang *merdeka* (bukan budak) (Rochmawati, 2017). Dalam istilah sosiologi status *karaeng* dan *maradeka* digolongkan ke dalam *ascribed status* (Soekanto, 2010). sehingga seseorang yang terlahir dari keluarga tersebut, secara otomatis akan mendapatkan status sebagai bangsawan (*karaeng*) dan *maradeka*.

Tahun 2016 merupakan periode kedua dalam memenangkan pilkades bagi masyarakat biasa (bukan *karaeng*), dalam hal ini Nurdin

sebagai orang biasa yang terlibat dalam pesta pilkades tentu tantangan tersebut tidak bisa dinafikan, pertama bahwa Nurdin sebagai orang biasa terlibat dalam pilkades, apalagi calon lain dari pihak *karaeng* merupakan representasi dari masyarakat yang sangat diunggulkan kalah pasca pemilihan kepala desa tahun 2016.

Munculnya calon dari kalangan masyarakat biasa sebagai titik awal yang memunculkan kesadaran sehingga terlibat berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Tentu keterlibatan masyarakat biasa (bukan *karaeng*) dalam partisipasi pilkades bukanlah hal yang mudah, apalagi melihat kenyataan sebelumnya bahwa hampir distribusi kekuasaan didominasi oleh kalangan *karaeng*. Kekalahan kelompok *karaeng* pasca pemilihan kepala desa tahun 2016 menandakan bahwa mangkirnya *trust* dikalangan *karaeng* di mata masyarakat biasa. Namun kalau kita melihat budaya yang terbangun pada masyarakat *karaeng* sangat positif, hal itu terbukti pada saat mereka berinteraksi dengan masyarakat, mereka sangat sopan dalam bertutur dan sangat menghargai orang lain. (Basir, 2017). Tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga transformasi kepemimpinan dari golongan *karaeng* bisa beralih ke golongan *maradeka*. Oleh karena itu, peneliti dalam hal ini tertarik untuk mengambil judul mengenai kekuatan modal sosial dalam transformasi kepemimpinan kepala desa di Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

Belum lagi ketika kita melihat kebelakang tahun 2015, selama kepemimpinan Nurdin sebagai kepala desa tidak ada perubahan yang berdampak pada masyarakat tentunya posisi sebagai kepala desa, masyarakat menggantungkan harapannya kepala desa untuk membawa masyarakatnya pada kesejahteraan, adil dan makmur. Tapi hal tersebut justru tidak terjadi, lalu kenapa masyarakat masih memilih Nurdin sebagai kepala desa pasca pemilihan pada tahun 2016?, jika memang Nurdin selama menjabat sebagai kepala desa tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap perubahan dalam memberdayakan masyarakat, membuat masyarakat lebih mandiri dan produktif yang bisa memberikan pendapatan bagi masyarakat. Lagi dan lagi pertanyaan yang telah dilontarkan sebelumnya sangat penting untuk dijawab, seharusnya masyarakat lebih sadar dan selektif dalam hal memilih pemimpin yang layak dan dianggap mumpuni dari berbagai hal.

Salah satu hal yang sangat berbahaya jika modal sosial tersebut tidak terdistribusi dengan baik sebagai kekuatan yang mentransformasi masyarakat lebih baik, akan tetapi modal sosial tersebut digunakan sebagai instrumen yang hanya menguntungkan secara sepihak. Bahwa modal sosial dapat mendorong ketimpangan terutama karena akses terhadap tipe jaringan yang berbeda terdistribusikan yang tidak merata. Setiap orang menggunakan koneksi mereka sebagai cara untuk mewujudkan kepentingannya, namun beberapa koneksi yang dibangun

orang lain lebih berharga dari pada koneksi yang dibangun orang lain.(Field, Jhon, n.d.)

Sangat menarik untuk mencermati kekuatan modal sosial yang muncul dan modal sosial yang dimiliki oleh Nurdin sebagai kandidat pilkades pada tahun 2016. Pada tahun 2016, ada empat calon kepala desa yang terlibat dalam kompetisi pilkades diantaranya Ishak, Nurdin, *karaeng* Asli, dan *karaeng* Bahar. Dari keempat calon tersebut, masing-masing memiliki modal sosial yang berbeda, secara modal ekonomi kita bisa katakan sangat sederhana dibanding dengan calon lain yang memiliki kapasitas ekonomi yang cukup menunjang sebagai kekuatan yang dapat mempengaruhi elektabilitas dukungan dari masyarakat, akan tetapi kekuatan ekonomi dalam kontes ini tidak berpengaruh secara signifikan dalam kemenangan Nurdin sebagai kepala desa, dengan melihat fakta tersebut tentunya ada modal lain yang sangat penting selain dari modal ekonomi. Belum lagi jika kita melihat masalah-masalah yang lain seperti, pembangunan di Desa Kindang sangat minim, khusus infrastruktur. Problem tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan aktor yang terlibat dalam kontestasi pilkades untuk menunjang keberhasilannya sebagai calon kepala desa sehingga mampu memenangkan kompetisi pilkades selama dua priode.

Berdasarkan latar belakang di atas maka, fokus penelitian ini adalah ***Kekuatan Modal Sosial dalam Kontestasi Politik Pemilihan Kepala Desa dengan Studi Kasus Keterpilihan Kepala Desa Kindang.***

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa ?
2. Bagaimana kekuatan modal sosial *bonding, bridging dan linking* dalam kontestasi politik pemilihan kepala desa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan kepala desa yang berdampak pada transformasi kepemimpinan dari masyarakat *karaeng* ke masyarakat biasa dalam hal ini yang berstatus sebagai masyarakat biasa.
2. Untuk mengidentifikasi kekuatan modal sosial *bonding, bridging dan linking* dalam kontestasi politik pemilihan kepala.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat ilmiah**

Dari segi keilmuan, hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi wacana dan memberikan kontribusi terhadap literatur kajian modal sosial.

### **2. Sebagai sumbangsi dan sekaligus berkontribusi dalam perkembangan ilmu sosial yang terkait dengan modal sosial.**

#### **1. Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan dalam hasil penelitian ini bermanfaat dalam memberikan informasi kepada calon agar kiranya bahwa keterlibatan masyarakat dalam pesta demokrasi sangat dibutuhkan modal sosial dan seharusnya modal sosial tidak digunakan sebagai instrumen dalam kepentingan pribadi sehingga hal tersebut menghambat jalannya sistem demokrasi yang diharapkan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kekuatan Modal Sosial dalam Kontestasi Politik Pemilihan**

##### **Kepala Desa**

##### **1. Konsep Modal Sosial**

Modal sosial (*social capital*) mempunyai beragam makna. Dalam ilmu ekonomi modal bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menguntungkan atau menghasilkan. Konsep modal sosial muncul dari pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak mungkin dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi tanpa bantuan masyarakat lain. Diperlukan adanya kebersamaan dan kerjasama yang baik dari segenap anggota masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasi masalah tersebut. Hanifan mengatakan bahwa modal sosial bukanlah modal dalam arti biasa seperti harta kekayaan atau uang, tetapi lebih mengandung arti kiasan, namun merupakan aset atau modal nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat. Menurut Hanifan, elemen yang termasuk kedalam modal sosial adalah kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati, serta hubungan sosial dan kerjasama yang erat antara individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial (Syahra, 2003). (Chris, 2009).

Putnam menganggap modal sosial sebagai seperangkat hubungan horizontal antara orang-orang. Maksudnya modal sosial terdiri dari “*networks of civic engagements*” jaringan keterikatan sosial yang diatur oleh norma-norma yang menentukan produktivitas suatu kelompok masyarakat atau komunitas. Jadi, menurut Putnam, ada dua hal yang merupakan asumsi dasar dari konsep modal sosial, yakni adanya jaringan hubungan dengan norma-norma yang terkait, dan keduanya saling mendukung guna mencapai keberhasilan di bidang ekonomi bagi orang-orang yang termasuk dalam jaringan tersebut. Burt (1992). Mendefinisikan modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi satu sama lain dan selanjutnya menjadi kekuatan sangat penting bukan hanya bagi aspek ekonomi akan tetapi juga setiap aspek kehidupan.(Cahyono & Adhiatma, 2016).

## **2. Unsur-Unsur Modal Sosial**

### **1. Nilai**

Setiap kehidupan sosial senantiasa ditandai dengan adanya aturan pokok yang mengatur perilaku anggota masyarakat yang berada di dalam lingkungan sosial tersebut. Dalam kehidupan manusia terdapat seperangkat nilai yang terpola yang harus dipatuhi dalam kehidupan sosial, pola tersebut meliputi: (a) Segala sesuatu yang menjadi dasar tujuan kehidupan sosial yang ideal atas dasar pola yang terbentuk di dalam realitas tersebut. Sesuatu yang menjadi harapan dan dasar tujuan kehidupan sosial merupakan awal munculnya sistem

nilai, yaitu sesuatu yang menjadi pedoman di dalam kehidupan sosial.

(b) Sesuatu yang telah menjadi pedoman untuk mencapai tujuan kehidupan sosial yang ideal maka didalamnya terdapat seperangkat nilai yang mengatur kehidupan sosial, baik aturan sebagai perintah baik aturan sebagai larangan, larangan tersebut menjadi sistem norma sosial yang mengatur kehidupan sosial. nilai dan norma adalah hal dasar yang terdapat pada proses interaksi sosial, nilai dan norma pengacu pada bagaimana seharusnya individu bertindak dalam masyarakat.

Nilai dan norma dalam kehidupan sosial merupakan konstruksi sosial masyarakat yang dibuat untuk mencapai kehidupan sosial yang dianggap ideal. Sehingga bisa dikatakan bahwa nilai adalah sesuatu hal yang abstrak atau berupa gagasan abstrak yang diproduksi oleh daya kreatif mental manusia. Nilai-nilai yang menjadi kesepakatan bersama merupakan ciri umum dalam kehidupan sosial yang dicita-citakan atau diinginkan yang dianggap baik. Adapun Norma sebagai wujud dari nilai-nilai yang terinci kedalam bentuk pola-pola kehidupan sosial. Jika pola tersebut telah melembaga dan telah terinternalisasi sebagai pedoman hidup melalui proses sosialisasi maka nilai tersebut akan menjadi acuan dalam kehidupan sosial atau dalam hal ini nilai tersebut menjadi fakta sosial, baik fakta sosial materil (norma hukum) maupun norma non materil (altruisme) yang mengatur sikap dan perilaku manusia.(George Ritzert, 2007:15).

Norma dan *trust* adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan begitupun juga jaringan. *Trust* yang muncul dalam kehidupan sosial merupakan produksi dari nilai yang dianut oleh individu atau kelompok. Jika *trust* yang muncul karena nilai agama yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, kepercayaan dan keadilan dalam interaksi sosial. Jaringan juga tidak bisa dipisahkan dari norma, jika jaringan tersebut karena adanya relasi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok yang terjadi karena adanya interaksi sehingga pertukaran yang saling menguntungkan, maka norma tersebut muncul dari adanya keuntungan timbal balik, jika keuntungan tersebut hanya dinikmati hanya sepihak, pertukaran sosial selanjutnya tidak akan terjadi, akan tetapi jika kedua belah pihak saling untung maka pertukaran sosial akan terjadi kerja sama antara satu dengan yang lainnya, maka dari situlah muncul norma dalam bentuk kewajiban sosial untuk saling menguntungkan dan kerja sama dimungkinkan akan terwujud.

## **2.Trust**

Kepercayaan (*trust*) merupakan hal yang fundamental dalam pesta demokrasi, posisi *trust* dalam pesta demokrasi merupakan elemen pelicin dalam memperlancar suatu harapan-harapan atau keinginan yang ingin dicapai, sehingga bisa kita katakan bahwa relasi kepercayaan (*trust*) dalam konteks pemilihan kepala desa merupakan modal yang harus dimiliki oleh calon, menurut Fukuyama kepercayaan (*trust*) merupakan harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat

yang ditunjukkan dengan adanya perilaku jujur, teratur dan kerja sama berdasarkan norma-norma yang diatur bersama. Norma-norma tersebut tidak hanya berlaku pada aspek nilai yang dapat memunculkan suatu sikap percaya kepada seseorang akan tetapi bisa saja norma-norma sekuler yang berkaitan dengan profesional dan kode perilaku. (Francis Fukuyama, 2010:) kepercayaan suatu bentuk untuk mengambil resiko dalam hubungan sosial yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak tidak tersebut tidak merugikan diri sendiri dan kelompoknya.(Uslaner, 2010).

Lawang (2005) menyebutkan tiga inti kepercayaan yang meliputi: *pertama*: hubungan sosial antara dua orang atau lebih, termasuk didalamnya institusi. *Kedua*: harapan yang terkandung dalam hubungan itu yang jika direalisasikan tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak. *Ketiga*: interaksi sosial yang memungkinkan hubungan dan harapan itu terwujud. dari ketiga dasar itu Lawang mendefinisikan kepercayaan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih yang didalamnya mengandung harapan yang menguntungkan salah satu atau kedua belah pihak melalui interaksi sosial.

Tingkat kepercayaan suatu masyarakat kepada seseorang tidak hanya menguntungkan dari ekonomi. Sebagaimana dikatakan Fukuyama bahwa *trust* bisa sangat bermanfaat untuk menciptakan

tatanan ekonomi yang unggul karena bisa diandalkan untuk mengurangi *costs*, dan mungkin pula, bukan hal yang mustahil akan mengurangi aspek lain seperti mereduksi *money politic* dalam pesta demokrasi yang sering kita jumpai. Salah satu kekuatan *trust* dalam pesta demokrasi adalah menghindari resiko, dan membuat aktivitas lebih fleksibel tanpa ada aturan formal atau kontrak sosial sebagai antisipasi mengurangi resiko.

Terpilihnya seseorang menjadi pemimpin kepala desa tidak dapat dipisahkan dari dukungan masyarakat yang ada disekitarnya. Karena Negara Indonesia adalah Negara menganut sistem demokrasi, sehingga pemilihan pemimpin harus dilakukan secara demokrasi pula, ini berarti bahwa dukungan dari masyarakat menjadi faktor yang sangat penting. Salah satu cara untuk mendapat dukungan dari masyarakat adalah dengan membangun jaringan atau *network*, membangun interaksi dengan masyarakat sekitar dll. Hubungan yang baik yang terjalin di dalam masyarakat bisa dikategorikan sebagai modal sosial. Arena pilkades adalah tempat pertarungan aktor dalam mendapatkan legitimasi atau kedudukan strategis. Tentunya untuk memperoleh itu, dibutuhkan modal sosial sebagai penunjang untuk mencapai tujuan. Selanjutnya Coleman mengidentifikasi tiga unsur utama yang merupakan kekuatan modal sosial. *Pertama*: kewajiban dan harapan yang timbul dengan adanya saling kepercayaan dalam lingkungan sosial. Yang *kedua*: adalah modal sosial pentingnya informasi yang lancar

dalam struktur sosial yang dapat mendorong berkembangnya suatu masyarakat, dan yang *ketiga*: adalah norma-norma yang harus di patuhi dengan sanksi yang sangat jelas dan efektif. Tanpa adanya norma-norma yang saling mendukung dan ditaati oleh masyarakat maka akan muncul anomie dalam masyarakat. Modal sosial sebagai seperangkat nilai-nilai yang terinternalisasi dalam masyarakat sebagai pemahaman dalam komunitas atau kelompok yang memiliki hubungan baik dalam masyarakat (Coleman, 1988).

Selain dari pada itu, modal sosial juga diperlukan untuk menjamin berlangsung sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Putnam bahwa modal sosial adalah salah satu prasyarat yang mutlak dimiliki oleh suatu pemerintahan agar tercipta pemerintahan yang baik dan efektif. Ada tiga alasan penting bagi Putnam untuk mengatakan demikian. Pertama, adanya jaringan sosial memungkinkan adanya koordinasi dan komunikasi yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya di antara sesama anggota masyarakat. Kedua, kepercayaan (*trust*) memiliki implikasi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dibuktikan dengan suatu kenyataan bagaimana keterkaitan orang-orang yang memiliki rasa saling percaya (*mutual trust*) dalam suatu jaringan sosial memperkuat norma-norma mengenai keharusan untuk saling membantu. Ketiga berbagai keberhasilan yang dicapai melalui kerjasama pada waktu sebelumnya dalam jaringan ini akan mendorong bagi keberlangsungan kerjasama

pada waktu selanjutnya. Lebih jauh Putnam mengatakan bahwa modal sosial bahkan dapat menjembatani jurang pemisah antara kelompok-kelompok yang berbeda ideologi dan memperkuat kesepakatan tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat (Syahra, 2003).

Kebenaran pendapat Putnam yang terakhir ini antara lain didukung oleh sebuah fakta empirik tentang bagaimana pemerintah di Polandia berhasil menghimpun para pakar dan pengusaha tanpa memandang ideologi untuk membangun negara pada masa pasca komunisme. Sebagaimana dikemukakan Sztompka (1999), berbeda dengan negara-negara Eropa Timur lain yang melakukan “dekomunikasi” atau pembersihan pemerintahan dari unsur-unsur pengikut paham komunisme. Pemerintah Polandia justru menunjukkan kemauan politik yang baik dan melupakan pertentangan ideologi masa lampau. Seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kemampuan pemikiran dan material tanpa memandang ideologi diajak dan diberi kepercayaan untuk bersama-sama membangun negara. Dengan dikesampingkannya perbedaan ideologi maka pemerintah dan masyarakat Polandia lebih berpeluang untuk berkonsentrasi dalam membangun ekonomi. Kasus Polandia ini memperlihatkan bahwa modal sosial berupa kepercayaan dan jaringan hubungan antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat merupakan salah satu kunci utama bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan ekonomi.

### **3. Jaringan**

Jaringan atau biasa disebut *network* adalah salah satu modal sosial yang tidak hanya bisa mengembangkan perekonomian masyarakat akan tetapi lebih dari pada itu, jaringan pula sangat bermanfaat dalam pesta demokrasi. Seseorang yang memiliki tingkat jaringan yang kuat lebih berpeluang memenangkan suatu pemilihan kepala desa, jaringan tersebut lebih mengara pada ikatan atau simpul antar individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok yang diikat oleh nilai budaya atau norma dalam suatu masyarakat. Nilai dan norma dalam masyarakat merupakan struktur yang terinternalisasi dalam masyarakat sebagai pengikat, sehingga kolaborasi diantara mereka merupakan intervensi dari norma yang disepakati bersama.

Jaringan dalam konteks pemilihan kepala desa merupakan kekuatan yang dapat melancarkan jalannya suatu harapan atau kepentingan individu atau kelompok. Salah satu media yang paling ampuh untuk memperluas jaringan adalah pergaulan. Arti jaringan dalam konteks modal sosial merujuk pada hubungan dengan orang atau kelompok lain yang memungkinkan pengentasan masalah dapat berjalan secara efisien dan efektif dalam mencapai suatu tujuan tertentu. (fied, 2010:32), Lin (2001) menjelaskan bahwa dalam modal sosial, penting menggunakan koneksi dan relasi sosial untuk mencapai tujuan. Modal sosial, atau sumber daya diakses melalui koneksi dan

hubungan merupakan sesuatu yang sangat penting bersama dengan sumber daya manusia, atau apapun yang dimiliki seseorang atau organisasi (Hapsari, 2016).

Putnam (Field,2010:49) mendefenesikan modal sosial dalam hal ini modal sosial merujuk pada bagian dari organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma, dan jaringan yang dapat meningkatkan efesiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi. Dalam defenisi tersebut putnam secara jelas menyebutkan elemen modal sosial yang terdiri dari kepercayaan sebagai elemen dasar dari sebuah hubungan asosiasional (tibal-balik), norma, dan jaringan atau interaksi sosial. Modal sosial dibedakan menjadi modal sosial yang menjembatani (*inklsuif* ) dan mengikat (*ekklusif*). Modal sosial yang mengikat cenderung mendorong identitas eksklusif dan mempertahankan homogenitas. Modal sosial yang mengikat berfungsi menopang resiprositas spesifik dan mobilisasi solidaritas dan menjadi perekat yang kuat dalam memelihara kesetiaan serta memperkuat identitas spesifik. Sedangkan modal sosial yang menjembatani cenderung menyatukan orang dari berbagai ragam ranah sosial dan lebih terbuka dan ini lebih baik menghubungkan aset eksternal dan bagi persebaran informasi (Field, 2010:52).

Jaringan merupakan salah satu modal sosial selain kepercayaan dan norma. Konsep jaringan dalam kapital sosial lebih memfokuskan pada aspek ikatan antar simpul yang bisa berupa orang atau kelompok

(organisasi). Dalam hal ini terdapat pengertian adanya hubungan sosial yang diikat oleh adanya kepercayaan yang mana kepercayaan itu dipertahankan dan dijaga oleh norma-norma yang ada. Kepercayaan itu dipertahankan oleh norma yang mengikat kedua belah pihak. Pada konsep jaringan ini, terdapat unsur kerja, yang melalui media hubungan sosial menjadi kerja sama. Pada dasarnya jaringan sosial terbentuk karena adanya rasa saling mengenal, adanya kesamaan kepercayaan politik atau agama, saling berbagi info, saling mengingatkan, dan saling membantu dalam melaksanakan ataupun mengatasi sesuatu. Intinya, konsep jaringan dalam kapital sosial menunjuk pada semua hubungan dengan orang atau kelompok lain yang memungkinkan kegiatan dapat berjalan secara efisien dan efektif (Putri et al., 2019).

Selanjutnya, jaringan itu sendiri dapat terbentuk dari hubungan antar personal, antar individu dengan institusi, serta jaringan antar institusi. Sementara jaringan sosial (*networks*) merupakan dimensi yang bisa saja memerlukan dukungan dua dimensi lainnya karena kerja sama atau jaringan sosial tidak akan terwujud tanpa dilandasi norma dan rasa saling percaya. Lebih lanjut, dalam menganalisis jaringan sosial.

Granovetter (2005) mengetengahkan gagasan mengenai pengaruh struktur sosial terutama yang dibentuk berdasarkan jaringan terhadap manfaat ekonomis khususnya menyangkut kualitas informasi. Menurutnya terdapat empat prinsip utama yang melandasi pemikiran

mengenai adanya hubungan pengaruh antara jaringan sosial dengan manfaat ekonomi, yakni: Pertama, norma dan kepadatan jaringan (network density). Kedua, lemah atau kuatnya ikatan (*ties*) jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerja sama,. Putnam (1995) berargumen bahwa jaringan-jaringan sosial yang erat akan memperkuat perasaan kerja sama para anggotanya..(Chris, 2009:17).

## **B. Kekuatan Modal Sosial Bonding, Bridging dan Linking dalam Kontestasi Politik Pemilihan Kepala Desa**

### **1. Kekuatan Modal Sosial Bonding dalam Kontestasi Politik**

#### **Pemilihan Kepala Desa**

Kekuatan modal sosial berdasarkan tipologinya menurut James Coleman ada dua aspek yaitu: pengikat (*bonding Social capital*), penjembatani (*bridging sosial capital*).(Coleman, 1988). Sedangkan jenis lain dari modal sosial yang ketiga adalah *linking social capital* (Kearns, 2004). Relasi modal sosial pengikat (*bonding*) dalam tranformasi kepemimpinan merupakan kekuatan bagi calon kepada desa. Karena ikatan tersebut biasanya diikat oleh ikatan moral, rasa tanggung jawab karena adanya kesamaan suku, agama dan tempat tinggal. Modal sosial *bonding* juga penting karena adanya kesamaan kepentingan untuk mempertahankan eksistensi kolompoknya. Sedangkan modal sosial menjembatani mengacu pada hubungan

antara kelompok dengan perbedaan yang signifikan.(Kearns, 2004). Dalam istilah Ibnu Khaldun hal tersebut disebut sebagai perasaan kelompok atau kohesi solidaritas (*ashabiyah*) yang dapat mengalahkan mereka yang telah kehilangan kohesifitasnya. *Ashabiyah* berarti mengikat, secara fungsional *ashabiyah* menunjuk pada ikatan sosial budaya yang menekankan pada kesadaran, kepaduan dan persatuan kelompok (M. Fahim, 2016).

Tipe modal sosial *bonding* biasanya terdapat pada masyarakat homogen. Modal sosial *bonding* merupakan potensi dalam transformasi kepemimpinan jika memiliki basis massa yang banyak. Sebaliknya, sangat sulit memenangkan suatu kompetisi jika basis massa sangat sedikit. Salah satu ciri modal sosial *bonding* adalah berorientasi kedalam, artinya diikat oleh rasa kekeluargaan yang sangat kuat. Sebagai konsekuensinya, akan melahirkan kohesi sosial yang sangat kuat sehingga kepercayaan (*trust*) diantara mereka relatif kuat. Hal ini sebagaimana yang di catatat oleh Fukuyama dengan mengambil contoh dari Negara Cina. Fukuyama mencatat bahwa komunitas cina memiliki ikatan kekeluargaan yang sangat kuat yang dikenal sebagai *familialisme*. Ikatan tersebut sangat intim sehingga produk dari adanya ikatan tersebut adalah rasa saling mempercayai yang sangat kuat, namun *trust* menjadi sangat rendah bagi seseorang yang berada diluar komunitasnya. Kekutan modal sosial menjadi pelumas yang

memperlancar hubungan serta kerja sama, sehingga harapan individu atau kelompok dapat tercapai secara efisien. (Francis, 2010:160) .

*Bonding* sosial kapital dikenal pula sebagai *sacred society* di mana dogma tertentu mendominasi dan mempertahankan struktur masyarakat totalitarian dan tertutup. Pola interaksi masyarakat selalu dituntun oleh nilai dan norma yang menguntungkan level hirarki tertentu, kekuatan modal sosial tersebut hanya terbatas pada kohesifitas kelompok. Kohesifitas kelompok tersebut membuat mereka tertutup dan sangat tinggi sikap fanatismenya. Nilai kolektifitas sangat kuat melebihi kepentingan atau nilai individu. Setiap individu bisa memanfaatkan *bonding* tersebut dalam memperoleh dukungan dalam berbagai aktivitasnya, karakteristik dari *bonding* adalah kesamaan suku, agama, ras, etnik dan identitas. Kesamaan ini melahirkan beban moral untuk saling monolong, kerja sama dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya (Abdullah, 2013)

Hasbullah menyatakan, pada masyarakat yang *bounded* atau *inward looking*, meskipun hubungan sosial yang tercipta memiliki tingkat kohesifitas yang kuat, akan tetapi kurang merefleksikan kemampuan masyarakat tersebut untuk menciptakan dan modal sosial yang kuat, kekuatan yang tumbuh sekedar dalam batas internal kelompok. Salah satu keawatiran banyak pihak selama ini adalah terjadinya penurunan keanggotaan dalam perkumpulan atau asosiasi, menurunnya ikatan kohesifitas kelompok, terbatasnya jaringan-jaringan

sosial yang dapat diciptakan, menurunnya saling mempercayai dan hancurnya nilai-nilai dan norma-norma sosial yang tumbuh.

## **2. Kekuatan Modal Sosial Bridging dalam Kontestasi Politik**

### **Pemilihan Kepala Desa**

Kekuatan *bridging sosial* merupakan salah satu kekuatan modal sosial. *Bridging* (menjembatani) adalah kemampuan untuk menjembatani atau menyambung relasi antar individu dan kelompok yang berbeda identitas asal, baik perbedaan status, agama dan suku. Karakteristik dari *bridging sosial* adalah sifat keterbukaan dan fleksibel, kebersamaan, kebebasan, nilai-nilai kemajemukan dan kemanusiaan. Modal sosial *bridging* sangat berkontribusi pada individu atau kelompok karena dapat memperkuat serta mengembangkan relasi antar kelompok yang lain. Karakteristik modal sosial *bridging* biasanya muncul dengan sebagai respon terhadap kelemahan kelompoknya sehingga mereka membangun relasi diluar kelompoknya untuk menutupi kelemahan tersebut.

Relasi antar kelompok yang berbeda identitas asal (etnik) menurut Kearns dapat dimaknai lebih luas seperti relasi antar sektor, misalnya sektor pendidikan, sektor ekonomi dan sektor sosial atau relasi organisasi ,lembaga serta asosiasi. Kekuatan relasi tersebut dapat digunakan oleh setiap individu atau kelompok untuk mengaksesnya tergantung pada kepentingan atau kebutuhan yang ingin dicapai. Jaringan yang terbentuk dalam *bridging sosial capital*

dengan pihak luar lebih mengarah pada *resiprocity* yang saling menguntungkan satu sama lain.

Menurut Hasbullah (2006) bentuk modal sosial menjembatani ini biasa disebut sebagai bentuk modern dari suatu pengelompokan, group, asosiasi. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang dianut didasarkan pada prinsip-prinsip universal tentang: (a) persamaan, (b) kebebasan, (c) nilai-nilai kemajemukan dan humanitarian (kemanusia, terbuka) (Ikram, n.d.).

Karakteristik dari prinsip *bridging sosial* adalah kelompok masyarakat biasanya lebih heterogen, artinya banyak perbedaan antara anggota masyarakatnya seperti perbedaan latar belakang pendidikan, budaya dan status sosial. Dalam konteks pemilihan kepala desa, seorang aktor tidak boleh mengandalkan potensi internalnya sebagai kekuatan, namun ia juga membutuhkan relasi *bridging sosial capital* sebagai kekuatan untuk memperlancar jalannya kepentingan individu dan kepentingan kelompok. (Keans, yang dikutip Suparman Abdullah, 2017:7).

### **3. Kekuatan Modal Sosial Linking dalam Kontestasi Politik**

#### **Pemilihan Kepala Desa**

Modal sosial *linking* berupa hubungan/ jaringan sosial dengan adanya hubungan diantara beberapa level dari kekuatan modal sosial maupun status sosial yang ada dalam masyarakat. Merupakan

hubungan sosial yang dikarakteristikan dengan adanya hubungan dengan beberapa level kekuatan sosial maupun status sosial yang ada dalam masyarakat. Misalnya hubungan antara masyarakat dengan elit politik dengan masyarakat umum dalam hal ini elit politik yang dipandang layak sebagai *public figure*/ tokoh dan mempunyai status sosial yang berbeda dalam masyarakat. Karena antara elit politik dan masyarakat sama-sama memiliki kepentingan misalnya, elit politik berkepentingan mendapatkan suara untuk mendukungnya sedangkan masyarakat berusaha mendapatkan orang dipercaya yang bisa dijadikan sebagai penyalur aspirasi dan mereka percaya sebagai wakilnya

### **C. Kekuatan Modal Sosial dalam Kontetasi Politik Pemilihan Kepala Desa**

#### **1. Kekutan Modal Manusia dalam Transformasi Kepemimpinan Kepala Desa**

Modal manusia atau *human capital* merupakan potensi dasar yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mengoptimalkan hidupnya, baik sebagai individu maupun relasi individu dalam kelompok. Melalui modal manusia yang dimiliki oleh seseorang dapat digunakan untuk memenuhi keinginannya dalam kehidupan sosialnya. Beberapa modal manusia yang dianggap berpeluang dalam mengotimalkan urusannya adalah: modal pendidikan, kekuatan fisik, keterampilan (Suparman Abdullah, 2017:53). Modal tersebut merupakan prestise individu yang dapat menciptakan

*reward* di mata masyarakat. Salah satu out put dari modal individu adalah *high trust* yang dianggap oleh masyarakat sebagai hal yang pantas dan layak dijadikan pemimpin.

(Imam B Jauhari, 2012: 147). Selain itu, ketokohan merupakan *human capital* sebagai hal yang representatif dalam pesta demokrasi, dalam suatu masyarakat biasanya memiliki beberapa tokoh, seperti, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda. Predikat ketokohan seseorang tidak muncul begitu saja, akan tetapi mengalami proses pengkristalan nilai kapasitas, kualitas integritas dan kredibilitas yang melekat dalam diri seseorang. Pengkristalan nilai pada seseorang mengalami proses yang panjang melalui interaksi yang intens dan beradaptasi sosial. seseorang tidak mungkin secara tiba-tiba secara langsung diangkat dan nilai sebagai seorang tokoh. Ketokohan seseorang merupakan simbol sekaligus menjadi *human capital*.

Ketokohan seseorang akan mereduksi *trust* jika seseorang yang ditokohkan tidak lagi konsisten terhadap nilai dan prinsip yang menjadi harapan warga selama ini. Predikat tokoh merupakan kapasitas, integritas dan kredibilitas yang dimiliki seseorang, sehingga mampu mempengaruhi orang lain. Ketokohan salah satu kekuatan yang biasanya dijadikan sebagai sarana dalam mengikuti pesta demokrasi yang berhubungan dengan kekuasaan (pengaruh), sebagaimana kekuasaan dipandang sebagai kekuasaan

yang dimiliki seseorang dalam mempengaruhi orang lain atau seseorang menjadi taat kepada kekuasaan tersebut. Kepatuhan dan ketaatan seseorang atau masyarakat terhadap sang tokoh dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu kapasitas, seperti pendidikan, keterampilan dan keberanian.

## **2. Relasi Gaya Kepemimpinan dan Modal Sosial dalam Transformasi Kepemimpinan Kepala Desa**

Relasi gaya kepemimpinan dan modal sosial dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Gaya kepemimpinan selalu menjadi indikator bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya dalam kontestasi. Sehingga, sekiranya seorang pemimpin yang pernah terlibat dalam struktur pemerintahan memberikan dua penilaian yang tak terhindarkan. *Pertama*: adalah respon positif terhadap pemimpin yang nilai oleh masyarakat sebagai pemimpin yang ideal yang dapat mewakili suara rakyat. Sehingga hal tersebut memungkinkan dan berfungsi menjadi kekuatan modal sosial dikemudian hari. Jika, terlibat dalam kontestasi politik. *Kedua* adalah: respon negatif. Dalam kepemimpinan. Respon negatif terhadap gaya kepemimpinan suatu hal yang tak terhindarkan pula bagi masyarakat. Masyarakat dalam menentukan pilihannya senantiasa melihat gaya kepemimpinan sebelumnya menjadi indikator sebagai tolak ukur untuk menjatuhkan sebuah pilihannya dalam kontestasi. Menurut Gibson mengemukakan, kepemimpinan adalah suatu usaha menggunakan

suatu gaya mempengaruhi dan tidak memaksa untuk memotivasi individu dalam mencapai tujuan. Sedangkan menurut Winardi kepemimpinan adalah hubungan di mana satu orang yakni pimpinan mempengaruhi pihak lain untuk bekerja sama secara suka rela dalam usaha mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan untuk mencapai hal yang diinginkan. Paling berpengaruh terhadap orang lain Kepemimpinan dan modal sosial adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Gaya Kepmimpinan yang ditunjukkan oleh seseorang bisa menjadi senjata untuk mendapatkan modal sosial yang kuat dari masyarakat. Pemimpin yang menunjukkan kepemimpinan yang adil dan *up to down* dapat semakin meningkatkan modal sosial dikalangan masyarakat. Namun, pemimpin yang tidak menjunjung tinggi nilai keadilan dan hanya membangun hubungan dengan para aparat pemerintah cenderung mendapatkan nilai yang negatif dari masyarakat dan memudahkan modal sosial dikalngan masyarakat tersebut.

Ada banyak definisi mengenai gaya kepemimpinan berikut adalah definisi gaya kepemimpinan menurut para ahli : Menurut Kartini Kartono “Gaya kepemimpinan adalah sifat, kebiasaan, tempramen, watak dan kepribadian yang membedakan seorang pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain”. (Kartini, 2009)

Menurut Miftah, Thoha. (Mhiffta, 2010). “Gaya kepemimpinan merupakan norma prilaku yang digunakan oleh seseorang dalam

bertindak. Orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain atau bawahan”. Menurut Herujito (2009: 188) “gaya kepemimpinan bukan bakat, oleh karena itu gaya kepemimpinan dipelajari dan dipraktekan dalam penerapannya harus sesuai dengan situasi yang dihadapi”. Menurut Tjiptono (Fandy, 2011). Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Sementara itu, pendapat lain menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku (kata-kata dan tindakan-tindakan) dari seorang pemimpin yang dirasakan oleh orang lain (Hersey, 2004). Pendapat yang serupa dikemukakan oleh Nawawi: Gaya kepemimpinan adalah perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap dan perilaku para anggota organisasi bawahannya. (Nawawi, 2003: 21) Sedangkan menurut Bangun: Ada empat gaya kepemimpinan berdasarkan model jalur-sasaran yang terdiri dari:

1. Kepemimpinan Direktif (*directive leadership*), bawahan mengetahui apa yang diharapkan dari mereka, dan pemimpin memberi pengarahan yang spesifik dalam menyelesaikan tugas.
2. Kepemimpinan Suportif (*Supportive leadership*), pemimpin dengan sikap ramah, dan menunjukkan perhatian besar kepada para masyarakat dan bawahannya.

3. Kepemimpinan Partisipatif (*participative leadership*), pemimpin berkonsultasi dan menggunakan saran dari bawahan sebelum mengambil keputusan.
4. Kepemimpinan berorientasi pada prestasi (*the achievement-oriented leadership*), pemimpin menetapkan serangkaian sasaran yang menantang dan mengharapkan mereka bisa mengerjakan dengan hasil yang baik. Selain dari pendapat di atas terkait dengan gaya kepemimpinan. (Bangun, 2012) Gaya kepemimpinan dalam lima tipe menurut pendapat Siagian sebagai berikut :

- 1) Gaya kepemimpinan Otokratis

Yakni kepemimpinan yang cenderung memiliki ciri-ciri pemimpin yang berkuasa sepenuhnya dalam pemerintahan dan tidak memperhatikan kebutuhan bawahan dan masyarakat karena mengidentifikasi tujuan pribadi dengan tujuan. Dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Menganggap pemerintahan sebagai milik pribadi
- b. Mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan pemerintahan
- c. Menganggap bahwa sebagai alat semata-mata
- d. Tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat
- e. Terlalu tergantung pada kekuasaan formalnya
- f. Dalam tindaknya penggerakannya sering mempergunakan *approach* yang mengandung unsur paksaan dan punitif (bersifat menghukum)

## 2) Gaya kepemimpinan militeristik

Kepemimpinan dalam menggerakkan bawahan dan masyarakat dengan menggunakan perintah bergantung pada jabatannya, serta menuntut disiplin yang tinggi dan kaku kepada pegawainya. dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Dalam menggerakkan bawahannya sistem perintah yang sering dipergunakan
- b. Dalam menggerakkan bawahannya senang bergantung pada pangkat dan jabatan
- c. Senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan
- d. Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahannya

## 3) Gaya kepemimpinan paternalistik

Gaya kepemimpinan yang mengayomi karena menganggap pegawainya tidak bisa mengambil keputusan sendiri selalu bergantung kepada pimpinan dan selalu melindungi. Hal tersebut kita bisa mengidentifikasi sifat kepemimpinan paternalistik sebagai berikut:

- a. Menganggap bahwa sebagai manusia yang tidak dewasa
- b. Bersikap terlalu melindungi
- c. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan
- d. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil inisiatif

- e. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasi
- f. Sering bersikap mau tahu

4) Gaya kepemimpinan karismatis dengan karakteristik yaitu:

Memiliki daya penarik yang sangat besar karena umumnya memiliki pengikut yang anggotanya dalam skala besar dan keikutsertaan anggota bersifat buta serta sangat setia kepada pimpinannya:

- a. Visioner. Pemimpin memikirkan atau merencanakan masa depan dengan kebijaksanaan dan imajinasi.
- b. Kreatif. Mereka berpikir di luar kotak, menerima tantangan dan melihatnya sebagai peluang.
- c. Memiliki kepribadian yang kuat. Pemimpin memancarkan kepercayaan diri, memiliki rasa diri yang kuat dan jarang mengungkapkan keraguan diri. Itu membuat banyak orang tertarik untuk mengikuti dan melaksanakan perintah mereka.
- d. Kerendahan hati (*humility*). Pemimpin peka terhadap lingkungan mereka dan kebutuhan pengikut. Mereka berhati-hati agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan atau melukai orang lain.
- e. *Risk taker*. Pemimpin berani untuk mengambil risiko pribadi demi mewujudkan visi dan menuju kondisi yang lebih baik.

- f. Komunikator ulung. Mereka mahir menggunakan perilaku tidak konvensional. Mereka mampu menggerakkan banyak orang hanya dengan kata-kata, pidato atau perilaku.
- g. *Self-monitoring*. Mereka membanggakan diri mereka sendiri yang tanpanya mereka tidak mendapatkan kegembiraan.
- h. Agen perubahan. Mereka mengubah status quo untuk menuju masa depan yang lebih baik.
- i. Pantang menyerah. Mereka tidak putus asa untuk mewujudkan cita-cita. Mereka tidak takut gagal meski harus menghadapi perjuangan dan tantangan yang sulit, bahkan berisiko kematian

#### 5) Gaya kepemimpinan demokratis

Yakni kepemimpinan yang mengutamakan diskusi dan berusaha mengutamakan kerja sama dalam mencapai tujuan organisasi, pemimpin yang memiliki karakter untuk menerima saran dan kritik serta mengerti kebutuhan pegawainya. kepemimpinan demokrasi dapat dilihat dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Wewenang pimpinan tidak mutlak (Dalam mengambil keputusan, dapat dipengaruhi oleh bawahan dalam bentuk masukan pada saat musyawarah.
- b. Keputusan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan (Dalam membuat dan mengambil keputusan, dilakukan

terlebih dahulu musyawarah antara atasan dan bawahan hingga mencapai kesepakatan.

- c. Komunikasi antara pimpinan dan bawahan berjalan dengan baik (Dalam melakukan komunikasi tidak terhalang rasa takut, malu, dsb yang disebabkan oleh jabatan)
- d. Adanya kebebasan mengemukakan pendapat (Bawahan mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat mereka secara bebas sesuai dengan asas demokrasi).
- e. Pimpinan membagi wewenang kepada bawahannya (Tidak semua tugas dan tanggungjawab harus diemban oleh pemimpin seorang, melainkan boleh dibagikan kepada bawahan selama masih dalam batas wajar). (Siagian P. Sondang, 2002)

Selain sumber kepemimpinan yang bisa menjadi modal sosial dari suatu pemimpin, Gaya kepemimpinannya (*leadership style*) juga memiliki peran penting untuk menarik modal sosial dari masyarakat. James M. Henslin membagi beberapa gaya kepemimpinan yang sering ditunjukkan oleh para pemimpin.

- 1) Pemimpin otoriter (*authoritharian leader*), yaitu seseorang yang dapat memberikan perintah. Misalnya, pemimpin menentukan segala kegiatan kelompok secara sepihak, pengikut sama sekali tidak diajak untuk ikut serta merumuskan tujuan kelompok dan cara-cara untuk mencapai tujuan kelompok tersebut, pemimpin

terpisah dari kelompok dan seakan-akan tidak ikut dalam proses interaksi didalam kelompok tersebut.

- 2) Pemimpin demokratis (*democratic leader*) yaitu seseorang yang berupaya mencapai consensus dengan mengajak warga atau anggota kelompok untuk ikut serta merumuskan tujuan-tujuan yang harus dicapai kelompok, serta cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Selain itu pemimpin demokratis juga adalah jenis pemimpin secara aktif memberikan saran dan petunjuk-petunjuk, mau memberi dan menerima positif, baik dari pemimpin maupun pengikut-pengikut, serta ia secara aktif ikut berpartisipasi didalam kegiatan-kegiatan kelompok.
- 3) Pemimpin laissez-faire (*laissezfaire leader*), yaitu seseorang yang sangat permisif, yang menjalankan peranannya secara pasif. Hal ini ditunjukkan dengan penentuan tujuan yang akan dicapai oleh kelompok sepenuhnya diserahkan kepada kelompok, pemimpin hanya menyediakan sarana yang diperlukan kelompok, pemimpin berada ditengah-tengah kelompok, namun hanya berperan sebagai penonton (Manik, 2013).
- 4) Gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh para otoriter nampak lebih efektif dalam situasi darurat gaya demokratis bekerja paling baik untuk semua situasi dan gaya *laissez-faire* biasanya tidak efektif karena bersifat pasif.

Kepemimpinan menurut Robert Kreitner dan Angelo Kinicki memiliki peran dan agen perubahan sosial yang berarti bagi kemajuan sebuah bangsa, merubah nasib rakyat dari keterpurukan hidup kepada kelayakan hidup (*better life*) sebagai manusia, dari keterpurukan ekonomi kepada perekonomian yang meningkat, sehingga hajat hidup rakyat dapat meningkat dengan baik, dari ketimpangan sosial (*social inequality*) pada keseimbangan hidup yang layak (*social equality*), dari banyaknya buta huruf menjadi melek baca kepada kecerdasan yang bermakna, dari pendidikan yang dibangun dapat menumbuhkan SDM yang handal, unggul dan tangguh, dari gizi buruk kepada nilai gizi yang sehat dan kesehatan yang lebih layak, dari kekumuhan kepada kebersihan dan kelayakan hunian menuju kedamaian, keadilan dan kesejahteraan rakyat. Jadi, tuntutan perubahan itu meliputi berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, sains dan teknologi, kesehatan, lapangan pekerjaan dan lain-lain.(Ahmad, 2014).

Pemimpin yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik memiliki peluang yang sangat besar untuk mendapatkan dan menguatkan modal sosial dalam suatu masyarakat. Kepemimpinan yang baik yang ditunjukkan oleh para pemimpin akan merangsang masyarakat untuk merekomendasikan dan memilih kembali pemimpin tersebut untuk mengikuti kontestasi politik. Sebaliknya Jika para pemimpin tidak mampu melakukan perubahan-perubahan

yang berarti dalam membangun kesejahteraan rakyat yang lebih layak, maka modal sosial yang ia miliki akan menurun yang menyebabkan kurangnya dukungan dari masyarakat untuk turut serta dalam kontestasi politik. Kepemimpinan yang normal adalah kepemimpinan yang memiliki idealisme yang tinggi dalam memikirkan dan memajukan anak negeri. Pemimpin yang merakyat adalah yang dapat merasakan denyut jantungnya rakyat dalam kepedihan dan kesusahan, bukan pemimpin yang pragmatisme yang jauh dari orientasi kerakyatan dan kepedulian terhadap keadaan nasib rakyat, hanya memikirkan dirinya sendiri (selfish) dan golongan.

### **3. Penelitian Terdahulu**

Pembahasan mengenai modal sosial telah banyak mengundang daya tarik bagi mahasiswa, baik mahasiswa yang sedang menyelesaikan studi pada strata satu atau strata dua sebagai prasyarat untuk menyelesaikan studinya di Kampus. Harus diakui bahwa telah banyak peneliti yang menjadikan modal sosial sebagai tema penelitian mereka seperti penelitian yang dilakukan oleh yang dapat kita lihat di dalam tabel tersebut di bawah ini:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Stella Maria Ignasi Pantouw (2012)	<i>Modal Sosial Dalam kontestasi Politik, (Studi Tentang Modalitas dalam Kemenangan Pasangan Hanny Sondakh dan Maximilian Lomban pada pemilukada di Kota Bitung Sulawesi Utara Tahun 2010</i>	Peneliti berfokus pada modalitas yang dimiliki oleh Hanny Sondakh sebagai seorang kandidat dalam pemilukada. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Hanny Sondakh memiliki beberapa modal seperti: <i>pertama</i> ; Hanny menjadi sosok sentral yang telah lama dikenal oleh masyarakat kota Bitung, sebagai pengusaha sukses yang merakyat dan baik hati. <i>Kedua</i> : Hanny memiliki kekuatan financial (modal capital/ekonomi) yang besar, dan <i>Ketiga</i> ; sebagai seorang ketua partai, Hanny juga didukung oleh sumber daya partai yang besar.
2	Indah Kartika Ratri, Amaliatulwalidain dan Isabella	<i>Strategi Pemenangan Yan Anton Ferdian Di Pilkada Langsung Kab. Banyuasin 2013,</i>	tujuan penelitian untuk mengetahui strategi yang digunakan untuk memenangkan pilkada langsung khususnya di Kab. Banyuasin. Dalam penelitian dikemukakan bahwa strategi politik yang dibangun oleh Yan Anton Ferdian sejak awal telah dikenal oleh masyarakat Banyuasin. Pasca kampanye, Yan juga melakukan berbagai macam pendekatan pada masyarakat pemilih sehingga memunculkan keakraban emosional antara calon dan pemilih. Strategi tersebut cukup berpotensi untuk menarik simpati masyarakat sekaligus sebagai basis untuk membangun modal <i>trust</i> dimata publik. (Indah et al., 2017)
3	Wahida Intania Sari	<i>Kontestasi politik: Strategi Pemenangan Paslon Faida-Muqit dalam pilkada Jember tahun 2015</i>	fokus penelitian yakni: bagaimana strategi partai yang dilakukan partai pengusung dan paslon Faida-Muqit untuk memenangkan paslon Faida-Muqit dalam pilkada serentak Jember 2015, salah satu strategi yang digunakan adalah konsolidasi partai pengusung, pembentukan relawan, kampanye, serta figur kandidat, strategi pemenangan paslon ini yakni figur dan citra diri di mana Faida adalah seorang Dokter yang berkolaborasi dengan Kyai sebagai

			<p>modal dalam memenangkan pilkada pada tahun 2015, terpilihnya Faida sebagai Bupati Jember tidak terlepas dari kekuatan modal sosial yang ia miliki, baik modal secara personal dalam hal ini, faida seorang dokter dan juga orang sangat rendah hati terhadap masyarakat Jember, keahlian yang ia miliki dijadikan sebagai instrumen dalam menarik simpati masyarakat hal itu terbukti ketika Faida melakukan pemeriksaan gratis, salah satunya adalah operasi mata katarak kepada lansia dan kaum dhuafa, hal tersebut dapat membuka harapan baru bagi masyarakat sehingga citra positif terbagun dalam diri Faida sebagai sosok yang diharapkan masyarakat jember. (Sari, 2015)</p>
4	Baharuddin dan Tawakkal (2015)	<p><i>Modalitas Calon Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 : Studi Kasus Indah Putri sebagai Bupati terpilih di Kabupaten Luwu Utara di Sulawesi Selatan</i></p>	<p>Hasil penelitian bahwa Indah modalitas sosial berupa interaksi sosialnya yang terjalin erat dengan masyarakat, selain itu Indah juga memiliki kepercayaan dari masyarakat setempat dan yang paling menunjang modal sosial Indah adalah jaringan relasi dari berbagai organisasi seperti HMI, IKA UI, IJMI dan lain sebagainya modal kedua yang dimiliki Indah adalah modal budaya yang didukung oleh pendidikan latarbelakang keluarga dan penghargaan yang diperoleh atas kontribusinya selama menjabat sebagai Wakil Bupati Luwu Utara, selanjutnya adalah modal ekonomi seperti harta kekayaan yang digunakan oleh Indah sebagai modal kampanye. Modal terakhir yang dimiliki Indah adalah modal politik berupa pengalaman politik sebagai tenaga ahli komisi dua DPR RI , Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Selain itu ia pula mendapatkan dukungan politik dari seorang mantan Bupati yang bernama Lutfi A. Mutty.(Baharuddin &amp; Purwaningsih, 2017).</p>

5	Tatik Romahwati (2013)	<p><i>Dinamika Politik Pedesaan Dalam Pemilihan Kepala Desa Masin, Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah</i></p>	<p>Dengan tujuan untuk melihat relasi aktor-aktor yang terlibat dalam pemilihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing calon memiliki strategi dalam memenangkan kompetisi tersebut. Seperti masing-masing calon kepala desa menggunakan <i>money politic</i> sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Selain itu mereka juga menggunakan pendekatan yang lain seperti membangun silaturahmi, mengadakan doa bersama, yang pada akhirnya memenangkan Sugianto sebagai kepala desa dengan jumlah suara 50%, calon kedua yaitu Masrur memperoleh jumlah suara 45%, sedangkan Asmilin sebagai calon terakhir hanya memperoleh suara 5%.(Rohmawati, 2013). Salah satu modal sosial yang dimiliki oleh Sugianto adalah modal pendidikan yang mengantarkan dirinya memenangkan kontestasi pemilihan tersebut. Menurut Pierre Bourdieu bahwa modal budaya, seperti pendidikan dapat menjadi modal sosial yang berimplikasi pada <i>trust</i>.(Chris, 2009). Lebih lanjut,</p>
---	------------------------	--	---

		<p>dikatakan bahwa dengan modal pendidikan yang dimiliki oleh seseorang maka kemungkinan untuk mendapat penghormatan dari masyarakat sangat besar. Hal inilah yang terjadi pada Sugianto yang merupakan seseorang yang memiliki pendidikan sehingga masyarakat sangat menghormati dan menyukai kepribadiannya. Selain itu ikatan kekeluargaan masih kental di Desa Masin, kenyataan tersebut bisa kita lihat sebagai modal sosial yang berbasis ikatan primordial atau disebut sebagai <i>bonding</i> sebagai penunjang yang dapat memberikan kontribusi untuk memenangkan kontestasi, meminjam istilah Ferdinand Tönnies yang hubungannya dengan kekerabatan berupa penguyuban (<i>Gemeinschaft</i>) hubungan tersebut tersebut biasanya diikat oleh hubungan darah (<i>gemeinschaft by blood</i>) penguyuban karena tempat tinggal (<i>gemeinschaft of place</i>) penguyuban karena kesamaan pikiran dan ideologi yang sama meskipun berbeda tempat dan tidak saling kenal akan</p>
--	--	---

			<p>tetapi memiliki kesamaan pemikiran sebagai daya dukung modal sosial. (M. Fahim, 2016). Presentase suara yang di peroleh Asmilin hanya 5% melihat kenyataan tersebut bahwa modal sosial yang dimiliki sangat kurang, lain halnya dengan Masrur yang memperoleh suara 45% yang tergolong masih relatif besar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa modal sosial memiliki daya dukung yang sangat kuat dalam kontestasi politik dan dapat menjadi pendukung yang sangat sentral dalam kemenangan perpolitikan.</p>
6	Rika Novitasari (2013)	<i>Partisipasi Politik Dan Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 Di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung</i>	<p>Dengan fokus penelitian pada perilaku pemilih. Di desa Ngunut ada dua calon yang terlibat dalam pilkades diantaranya: Ibu H. Nanik Wahyuningsi dan calon kedua bapak Abdullah. Ibu H. Nanik Wahyuningsi istri kepala desa sebelumnya yang menjabat sebagai kepala desa, pasca pemmilihan selanjutnya maka dimenangkan oleh Bapak Abdullah, kemenangan tersebut tidak terlepas dari tingginya tingkat <i>trust</i> terhadap Bapak Abdullah sehingga partisipasi pemilih memberikan suatu</p>

			<p>dukungan kepada bapak Abdullah, alasan kedua masyarakat memilih bapak Abdullah tidak terlepas dari daya kritis masyarakat dalam memilih calon, salah kekritisannya pemilih bahwa dia melihat latar belakang calon, kepribadian calon dan kehidupan sehari-hari calon (Rika, 2014).</p>
--	--	--	---

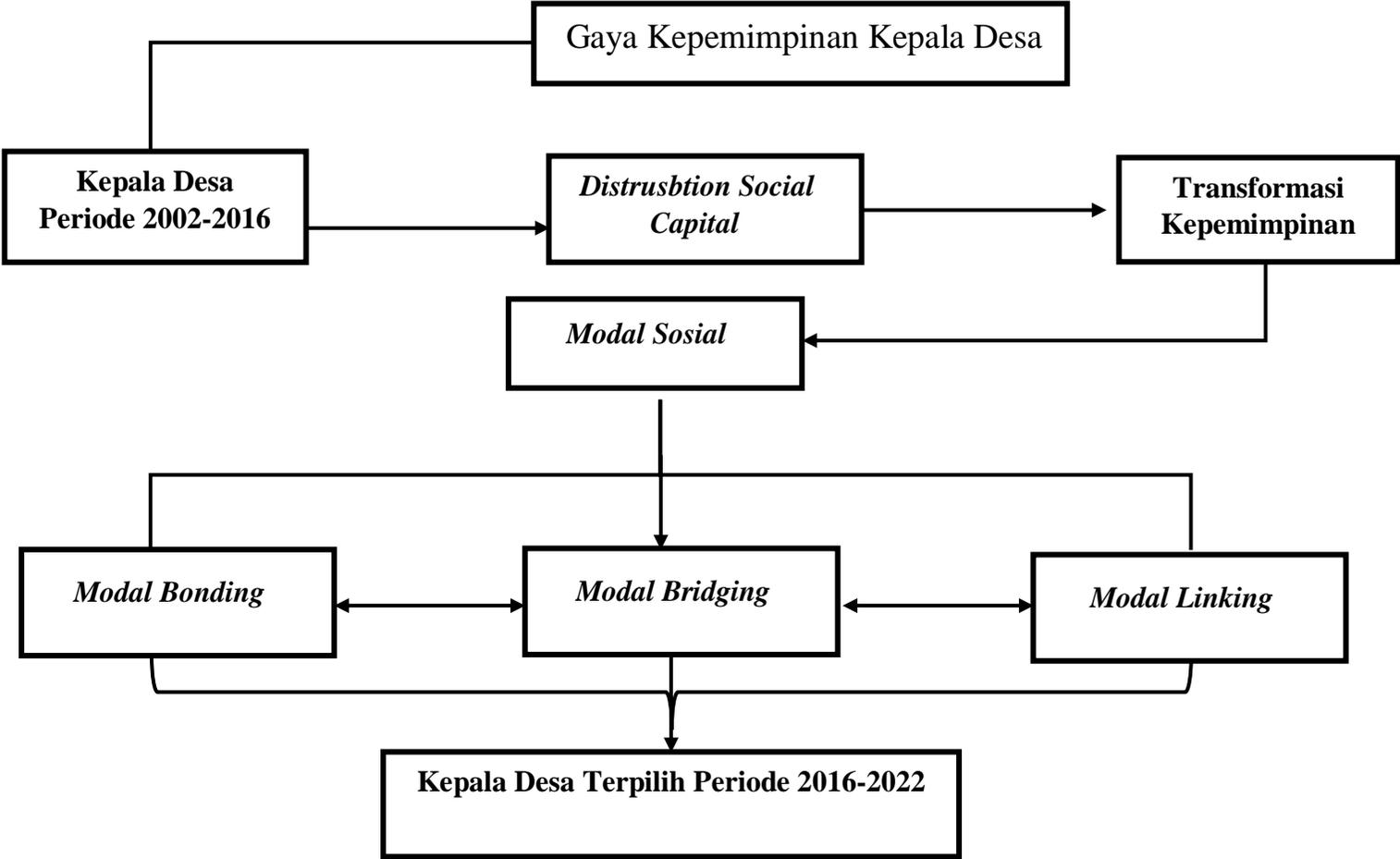
Daya dukung modal sosial merupakan hal yang fundamental yang dalam relasi untuk mendapatkan kekuasaan, akan tetapi dari penelusuran literatur tersebut diperoleh data bahwa kekuatan modal sosial berupa uang merupakan alat yang dijadikan sebagai instrumen keberhasilan suatu kompetisi pilkades atau pilakada, akan tetapi seharusnya *money politics* tidak seharusnya terjadi. Sebagaimana yang diungkapkan Fukuyama bahwa masyarakat yang memiliki *trust* bisa mengurangi transaksi ekonomi dan juga bisa memperlancar kerja sama jika diantara saling mempercayai satu sama lain. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika modal ekonomi (*money politics*) yang dijadikan strategi untuk mendapatkan suatu dukungan, maka modal *trust* tidak memberikan suatu implikasi besar.

Berdasarkan telaah pustaka di atas ada beberapa yang telah melakukan penelitian tentang modal sosial, akan tetapi dari beberapa penelitian tersebut tidak ada yang menyentuh antara lain. *Pertama*, kondisi sosial yang dianggap oleh penulis sangat berpotensi dalam menumbuhkan modal sosial seorang aktor, modal sosial seorang aktor tidak bisa direduksi dalam relasi lingkungan sosial di mana aktivitas sosial sedang berlangsung. *Kedua*, adalah sejarah dan gaya kepemimpinan pasca *karaeng* berkuasa di Desa Kindang. Sejarah yang dimaksud adalah peristiwa masa lalu pasca kalangan *karaeng* sebagai pemimpin kepala desa, suatu catatan kelam di masa lalu bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi, misalnya adanya perlakuan diskriminatif sehingga memunculkan kesadaran identitas bagi kelompok sosial untuk bersatu sehingga transformasi kepemimpinan bisa

terjadi, hal itu harus juga dilihat sebagai dimensi sekaligus potensi yang dapat mempengaruhi dan memunculkan solidaritas dalam kehidupan masyarakat untuk memilih pemimpin yang dianggap layak. Selain itu, secara spesifik belum ada yang melakukan penelitian dengan menggunakan variabel bonding, bridging dan linking sebagai kekuatan modal sosial dalam kontestasi pemilihan kepala desa.

Berdasarkan gagasan di atas maka penulis menggambarkan secara konseptual. Gaya kepemimpinan sebagai variabel utama untuk melihat korelasi antara gaya kepemimpinan sehingga terjadi *distrubstion cocial capital* dalam kontestasi pemilihan kepala desa. Dalam kontestasi pemilihan kepala desa pada tahun 2016. Maka, penulis mengkaji kekuatan modal sosial calon kepala desa dalam kontestasi pemilihan kepala desa. variabel kekuatan modal sosial dimaksud adalah modal sosial *bonding*, *bridging* dan *linking* dalam kontestasi pemilihan kepala desa.

D. Kerangka Pikir



Gambar. 1 Skema Kerangka Konseptual

Sepanjang sejarah perpolitikan di Desa Kindang, calon kepala desa selalu didominasi oleh pihak bangsawan (*karaeng*), sehingga secara otomatis jabatan kepala desa selalu dipegang oleh pihak bangsawan (*karaeng*). Dalam hal ini masyarakat biasa atau *maradeka* selalu menjadi masyarakat yang dipimpin oleh pihak bangsawan (*karaeng*). Pencalonan tunggal dari pihak *karaeng* dipicu oleh kurangnya keberanian yang dimiliki oleh masyarakat biasa untuk bertarung dalam kontestasi politik pemilihan kepala dengan pihak *karaeng*. Walaupun pihak *karaeng* yang notabene adalah masyarakat bangsawan memiliki keluarga dan hubungan emosional yang kurang baik dengan masyarakat, mereka masih kurang percaya diri untuk bertarung. Ketidakberanian dan percaya diri ini disebabkan oleh status sosial baik dari segi budaya masyarakat *karaeng* lebih tinggi dari masyarakat biasa. Masyarakat *karaeng* juga dikenal sering melakukan perlakuan yang kurang pantas seperti pemukulan terhadap masyarakat biasa. Sehingga hal ini semakin menciutkan mental pihak masyarakat untuk bertarung dalam ranah politik. Selama pihak *karaeng* memimpin terjadi pemukulan terhadap masyarakat biasa dikarenakan ketidakpatuhan mereka terhadap *karaeng* sebagai pemerintah. Kepemimpinan yang ditunjukkan oleh pihak *karaeng* bersifat otoriter yang ingin agar masyarakat selalu mengikuti keinginan dari pemerintah.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa modal yang paling berpengaruh yang dimiliki oleh *karaeng* untuk mendominasi

politik kepala desa adalah modal budaya. Modal budaya yang termanifestasi dalam status sosial yang dimiliki oleh *karaeng* memberikan rasa percaya diri yang tinggi untuk selalu memimpin masyarakat di Desa Kindang. Karena status sosial yang tinggi itu pula, masyarakat biasa memiliki ketakutan terhadap pihak *karaeng* baik untuk melawan baik dalam dunia politik maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun, dunia perpolitikan di Desa Kindang menemui titik baru pada pencalonan kepala desa tahun 2009. Hal ini disebabkan munculnya calon yang berasal dari pihak masyarakat biasa yaitu Nurdin. Pencalonan perdana yang berasal dari masyarakat biasa mencatat sejarah baru. Masyarakat Desa Kindang ternyata memberikan dukungan yang lebih terhadap Nurdin dibandingkan dengan pihak bangsawan (*karaeng*), sehingga Nurdin berhasil memenangkan pertarungan politik kepala desa. Hal ini membuktikan bahwa modal budaya yang tercermin dalam status sosial yang dimiliki oleh pihak *karaeng*, tidak mampu mengalahkan antusias masyarakat untuk mendukung masyarakat dari rumpun mereka. Hal ini lebih menguatkan pandangan bahwasanya masyarakat biasa membutuhkan figure pemimpin dari serumpun mereka karena pada tahun 2016, Nurdin kembali mencalonkan sebagai kepala desa bertarung dengan dua calon yang berasal dari pihak *karaeng*. Hasil pemilihan kepala desa pada tahun 2016 kembali memenangkan Nurdin.

Pencalonan Nurdin dan juga calon kepala desa lainnya tentunya membutuhkan modal sosial untuk bertarung dalam kontestasi politik. Pencalonan Nurdin pada tahun 2016 melawan dua calon yang berstatus sebagai bangsawan (*karaeng*) dan satu dari pihak serumpunnya (masyarakat biasa) memicu distribusi modal sosial karena calon pada tahun 2016 mempertemukan 2 calon dari pihak *karaeng* dan 2 calon dari pihak masyarakat biasa.

Modal sosial ini bisa berupa hubungan kekeluargaan (*bonding*), keanggotaan dalam suatu organisasi (*linking*) dan *bridging*. Calon kepala desa yang memilih untuk bertarung dalam politik biasanya memiliki *basic bonding* yang kuat karena lumbung utama dukungan suara akan mereka peroleh dari unsur internal hal ini juga terjadi dalam pertarungan politik di Desa Kindang yang mana ke empat calon kepala desa pada tahun 2016 memiliki keluarga yang tersebar di beberapa dusun di Desa Kindang. Seperti Nurdin yang memiliki keluarga besar di Dusun Sapayya dan Dusun Mattirodeceng, selain itu Ishak memiliki keluarga besar di Dusun Mattirodeceng dan Dusun Cibolo. *karaeng* Asli dan *karaeng* Bahar notabeneanya masih berasal dari satu rumpun keluarga memiliki keluarga besar di Dusun Cibollo dan Dusun Bungayya. Namun berdasarkan kuantitas jumlah keluarga, Nurdin adalah calon yang memiliki jumlah keluarga yang lebih banyak dibandingkan dengan tiga calon lainnya.

Selain itu, untuk menambah jumlah suara calon kepala desa, mereka membutuhkan dukungan dari pihak masyarakat lain. Aktor calon kepala desa membutuhkan media untuk (*bridging*) untuk menarik simpati masyarakat agar ia dapat dipilih. Salah satu cara untuk mendapatkan dukungan tersebut adalah melalui keluarga dan rekam jejak aktor politik. Berdasarkan penelitian didapatkan bahwa mayoritas masyarakat memilih Nurdin karena keluarganya terkenal memiliki perilaku yang baik terhadap masyarakat lainnya, sehingga hal ini juga menjadi pertimbangan untuk memilih Nurdin sebagai kepala desa. Sebaliknya, *karaeng* Bahar dan *karaeng* Asli yang notabenebenya berasal dari keturunan *karaeng* (*bangsawan*) yang selama ini memimpin Desa Kindang mendapat kerugian dalam hal dukungan. Hal ini disebabkan karena kepemimpinan *karaeng* yang dinilai oleh masyarakat tidak memperhatikan masyarakat biasa dan juga pemimpin yang sangat otoriter terhadap masyarakat biasa. Akibatnya, masyarakat yang telah merasakan dampak kepemimpinan pihak *karaeng* selama beberapa periode menyurutkan semangat mereka untuk menjatuhkan pilihan terhadap *karaeng* Bahar atau *karaeng* Asli.

Akhirnya cara lain untuk mendapatkan support dari masyarakat adalah keanggotaan calon kepala desa dalam suatu organisasi tertentu, hubungan dengan elit politik atau masyarakat yang memiliki basis massa dilingkup desa (*linking*). Beberapa hal tersebut dapat menjadi

lambung suara bagi calon kepala desa. Nurdin mendapatkan banyak keuntungan dari pendukungnya, apalagi pendukung dari Nurdin adalah tokoh masyarakat yang memiliki jabatan seperti Ketua RK dan ketua RT di beberapa dusun yaitu: Dusun Mattirodeceng dan Dusun Sapayya, dan Dusun Bungayya. Berdasarkan kenyataan yang terjadi dilapangan, terjadi transformasi kepemimpinan dari masyarakat *karaeng* ke masyarakat biasa yang bwerawal pada tahun 2009 dan berlanjut pada tahun 2016 sampai saat ini.